

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 1961, *Pengantar Hukum Adat*, Ichtiar, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Iman Sudiyat, 2010, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2019, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat - Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, PT Alumni, Bandung.
- Moch. Iqbal, 2012, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakuknya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

- R. Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 2015, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.

2. Jurnal

- Ferry Fathurokhman, 2010, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Law Reform, No. 1, Vol. 5., Semarang.
- Galuh Faradhilah Yuni Astuti, 2015, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta, No. 2, Vol. 10, Semarang.
- I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3, Vol. 21, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2016, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, No. 2, Vol. 17, Bandung.
- Pujiyono, 2011, *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH), No. 2, Vol. 40, Semarang.

3. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Website

Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/>.

CNNIndonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi Kelima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/>.

5. Sumber Lainnya

Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB).

Indische Staatsregeling (IS)

Materi Pemaparan oleh La Syarifuddin dalam acara Seminar Nasional “Pembaruan Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat” – Program Studi Magister Hukum FH Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan DPD Mahupiki Kalimantan Timur, Samarinda pada tanggal 14 Maret 2023 yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*.

Materi Pemaparan oleh R. Benny Riyanto dalam acara “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” pada 11 Januari 2023 di Hotel Santika, Padang, dengan judul *Sejarah & Perkembangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Materi Pemaparan oleh Topo Santoso dalam acara Seminar Nasional “Pembaruan Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat” – Program Studi Magister Hukum FH Universitas Mulawarman Bekerjasama dengan DPD Mahupiki Kalimantan Timur, Samarinda pada tanggal 14 Maret 2023 yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*.

